

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum Edisi I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fahmi, I. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta, hlm 5
- Graham, C. K. (2009). *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, A. (2008). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Haryanta, A. T., & Sujatmiko, E. (2012). *Kamus sosiologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.
- Iswara, I. A., Sukma, P. A., & Jakesunu, K. T. (2023). *Penyimpangan Keuangan LPD di Bali: Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Denpasar: Ruas Media.
- Joesyiana, K. (2018). Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Media Online Shopee di Pekanbaru. *Jurnal Valuta*, 4(1), 94.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Madra, I.K. (2012). "Geliat LPD Desa Adat Kedonganan: LPD Sebagai Motor Pembangun Desa Adat", Gedong, Edisi I (01).
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Graf Indo Persada.
- Munir, Faudy., (2013). *Hukum Jaminan Hutang*. Erlangga, Jakarta
- Naja, H. D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurjaya, I., & dkk. (2011). *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*. Bali: Udayana University Press. Retrieved from <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/28183>
- Philippus, M. H. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Putra.I.B.W. (2011). Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali. Denpasar: Udayana University Press. h.70.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. hlm 30.
- Soerodjo, I. (2016). *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan, Perjanjian Build, Operate And Transfer (Bot Atas Tanah .* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta, hlm 115.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, R., & Djoni, S. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artikel dalam jurnal**
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *DER LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 68-88. doi:<https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1157>
- Dai, R. M., Suryanto, & Novianti, S. (2017). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Koperasi (Studi pada Koperasi Rahastra Credit Union Bandung). *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, 7, 68. doi:<https://doi.org/10.34010/jika.v7i1.1907>
- Darwance. (2017). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif, Vol.XI/No.2/Desember 2017*, hlm 197.
- Dantes, K. F. (2019). Kedudukan Harta Kekayaan Debitor Yang Dibebankan Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pailit. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan dan Kewarganegaraan*. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019
- Dewi, N. D., Marwanto, & Indrawati, A. S. (2019). Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Intaran Di Desa Pakraman Sanur. 2.
- Divayana, D. H., Ariawan, I. W., & Suyasa, P. A. (2019). Pelaksanaan KKN-PM Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Demi Mewujudkan Swadaya Pemenuhan Kebutuhan Vital Berlandaskan Semangat Ngayah. *Jurnal Widya Laksana*. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019
- Harahap, A. S. (2008). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Lex Jurnalica*, 5, hlm 160-161.

- Hariani, R. R. (2016). Evaluasi Kinerja Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Studi Kasus : Kasi Pelayanan Umum, hlm 55.
- Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 42-53.
- Lailiyah , A. (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untu Meminimlaisir Resiko. *Jurnal Yuridika*. 29(2) Mei 2014
- Piadnyan, K. B., Budiarta, I. P., & Arini, D. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum* 2(3) Tahun 2020
- Saraswati, R. A. (2012). Peranan analisis laporan keuangan, Penilaian prinsip 5c calon debitur dan pengawasan kredit Terhadap efektivitas pemberian kredit Pada pd bpr bank pasar kabupaten temanggung. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 1(1).
- Setyaningsih, N. A. (2021). Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Subjek Dalam Mengajukan Permohonan Pailit. *Jurnal Aktual Justice*. Volume 6 Nomo 2 Desember 2021
- Sulaiman. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum . *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255-272.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Wibawanti, S. S. (2017). Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank, hlm 111 Volumen 1 Nomor 1 Tahun 2017
- Wibawa, I. P., & Astika, I. P. (2020). Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016-2017. *Jurnal Akuntansi*, 30 (2).

Skripsi

- Mayundra Putra, I. D. (2021). Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Membebaskan Hak Tanggungan Pada Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan . Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yusakawati, N. M. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Seminyak. Universitas Mahasaraswasti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Lembar Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3).

